

MENILAI STRATEGISNYA KERJA SAMA APJII DENGAN DITJEN DUKCAPIL

FOKUS UTAMA

Jakarta - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) baru saja meneken perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI. Bersama dengan 11 institusi lain, APJII memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP elektronik untuk melayani pelanggan.

Harus diakui, kolaborasi ini merupakan terobosan penting. Mengapa demikian?

Seperti diketahui, pemerintah sedang menggalakkan program Single Identity Number (SIN). Kebijakan ini akan membuat setiap penduduk Indonesia memiliki satu nomor tunggal, yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Harapannya, masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan berbagai pelayanan serta meminimalisasi kejahatan.

Dalam momen penandatanganan kerja sama tersebut, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif mendemonstrasikan bagaimana NIK dimanfaatkan.

Menurutnya, saat ini pemerintah berupaya merapikan database e-KTP. "Jadi masih banyak penduduk Indonesia yang punya lebih dari satu KTP. Ke depan, hal ini tidak akan ada lagi," ujarnya di pertengahan Januari 2019.

Dengan demikian, proses verifikasi menjadi lebih valid. Bagi institusi yang berbasis pelanggan, hal ini jelas sangat penting. Perusahaan asuransi dan jasa keuangan misalnya, harus sangat berhati-hati dengan pelanggan untuk menghindari fraud atau penipuan. Hal serupa juga berlaku bagi Internet Service Provider (ISP) yang banyak melayani pelanggan ritel.

Ketua Umum APJII Jamalul Izza menjelaskan, melalui kerja sama ini para anggota APJII akan memiliki perangkat ampuh untuk validasi pelanggan. "Hal ini misalnya dapat menghindari pelanggan memakai KTP palsu," ucapnya.

Jamal melanjutkan, selama ini pendaftaran pelanggan hanya dilakukan dengan fotokopi KTP. Ke depan, ISP bisa mengecek kesesuaian nama dengan NIK, serta memastikan keaslian KTP tersebut. upaya ini diharapkan bisa mencegah agar internet tidak digunakan untuk hal-hal negatif seperti penipuan.

Proses validasi ini sejatinya serupa dengan kebijakan registrasi kartu Prabayar yang dilakukan sejak tahun lalu oleh operator telekomunikasi seluler. Bedanya, kebijakan tersebut dilakukan untuk

Sedangkan, kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Dukcapil dilakukan untuk merapikan industri broadband, terutama pelanggan ritel.

Menurut Jamal, pelanggan ritel memang menjadi prioritas dalam kerja sama ini. Sebab, selain jumlahnya sangat banyak, proses verifikasi pelanggan komersial jauh lebih mudah dilakukan. "Kalau pelanggan korporat biasanya harus pakai NPWP dan dokumen lainnya," ujarnya.

Kerja sama ini memang baru dimulai. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah sosialisasi kepada seluruh anggota APJII. Ke depan, para anggota bisa bekerja sama langsung dengan Ditjen Dukcapil. Namun, saat ini pengurus pusat Asosiasi masih mematangkan teknisnya.

Respons Anggota Asosiasi

Kebijakan ini rupanya langsung mendapatkan respons positif dari sejumlah anggota. Dari Bali, Direktur PT Cakra Lintas Nusantara Arnold Makasau menuturkan, sebagai langkah awal, kerja sama ini cukup bagus karena dapat membuka peluang dalam mengoptimalkan data yang ada di Ditjen Dukcapil untuk kepentingan keamanan bisnis.

"Tentunya kerja sama ini akan melahirkan layanan-layanan baru, khususnya dalam kaitan bisnis fintech yang bisa dijalankan oleh ISP lokal maupun nasional," ucapnya.

Manfaat lainnya, ketika single identity number sudah dipakai secara luas, ISP bisa ikut menjadi bagian dari institusi yang memverifikasi klien perorangan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Arry Abdi Syalman, Direktur PT Trans Nasional Teknologi yang beroperasi di Sulawesi Selatan. Menurutnya, kerja sama ini bermanfaat bagi seluruh anggota APJII, terutama ISP yang melayani pelanggan ritel. Penyedia jasa pun akan sangat terbantu dalam hal efisiensi saat proses verifikasi data calon pelanggan.

"Integrasi data Dukcapil bisa mempercepat proses pelayanan terhadap pelanggan baru, serta memangkas waktu pelayanan lebih singkat," ungkapnya.

Dengan demikian, akan ada efisiensi biaya operasional, karena tidak perlu lagi mengerahkan tenaga untuk survei dan pencocokan data yang biasanya merepotkan. Hal tersebut juga menjadi cikal bakal bagi ISP untuk membuat sistem database pelanggan yang lebih praktis dan aman tentu saja. ***



“AMAN DAN NYAMAN Bersama Data Dukcapil”

Tahun 2018 seolah menjadi babak baru dalam pengelolaan industri seluler di Indonesia. Pada periode itulah kebijakan registrasi prabayar mulai ditegakkan. Jika sebelumnya pelanggan seluler bebas mengisi identitas registrasi dengan data apa pun, hal tersebut tidak mungkin lagi dilakukan kini.

Sebab, registrasi harus dilakukan dengan data yang valid dan memperhatikan kesesuaian antara nama pelanggan dan Nomor Induk Kependudukan yang bersangkutan. Singkatnya, operator telekomunikasi kini bisa memantau dengan pasti siapa menggunakan nomor apa.

Kebijakan ini bukan tanpa polemik. Perdebatan terus berlangsung hingga saat ini. Namun, banyak pihak mendukungnya, sebab kebijakan ini memang memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah meminimalisasi penggunaan nomor seluler untuk aksi kejahatan seperti penipuan.

Jika industri seluler sudah dirapikan, tidak demikian dengan pelanggan internet berbasis broadband. Selama ini, ISP hanya melakukan verifikasi menggunakan fotokopi kartu identitas penduduk, yakni KTP. Masalahnya, perusahaan tidak pernah tahu apakah pelanggan menggunakan KTP asli atau palsu. Perusahaan penyedia jasa juga masih direpotkan untuk proses verifikasi dan survei yang memakan waktu dan biaya operasional tidak murah.

Problem inilah yang coba diatasi dengan kolaborasi antara APJII dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI. Dengan kerja sama ini, anggota APJII bisa memiliki akses ke data kependudukan yang dimiliki pemerintah untuk keperluan verifikasi. Dengan demikian, proses ini akan mengurangi peluang adanya penipuan oleh pelanggan atau penggunaan internet untuk hal-hal yang melanggar hukum.

Kerja sama ini memang baru dimulai. Ke depan, ISP bisa langsung berkolaborasi dengan Ditjen Dukcapil. Dengan demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Mulai dari mematangkan teknis kerja sama hingga merancang inovasi-inovasi bisnis baru yang bisa digarap. Namun, setidaknya kita sudah bersiap. Saat program Single Identity Number sudah diterapkan merata di seluruh Indonesia, APJII dan anggotanya tidak akan lagi kerepotan dengan verifikasi data pelanggan. ***

REDAKSI

Publisher APJII

Managing Editor Henri Kasyfi Soemartono

Editor Much Rif'an

Penulis Tim APJII

Kontak Sekretariat APJII,

Gedung Cyber Lt. 11 Jln Kuningan Barat No. 8 Jakarta 12710 Indonesia

Phone +62-21 5296 0634

Fax. +62-21 5296 0635

Email bulletin@apjii.or.id

Twitter Paling Banyak Dilaporkan Warganet karena 'Konten Negatif'

Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) merilis media sosial yang paling banyak dilaporkan warganet melalui @aduankonten, aduankonten.id, dan nomor hotline WA 08119224545 sepanjang tahun lalu.

Berdasarkan keterangan resmi Kemkominfo pada awal Januari 2019, Twitter ternyata mendominasi dengan 'gelar' sebagai media sosial yang paling banyak dilaporkan karena konten negatif.

Sebanyak 531.204 laporan diterima Kemkominfo terkait konten negatif dari Twitter. Adapun untuk Facebook dan Instagram, jumlah pelaporannya masih jauh dibandingkan Twitter yakni 11.740 kali.

Sementara YouTube dan Google dilaporkan sebanyak 3.287. Kemudian, aplikasi layanan pesan instan terbanyak dilaporkan melalui kanal aduankonten adalah Telegram sebanyak 614 laporan. Selain itu, LINE dan BBM masing-masing sebanyak 19 kali dan 10. Paling rendah dibandingkan layanan pesan instan lainnya.

"Dari semua aduan itu, Kemkominfo menerima laporan warganet mengenai konten negatif di media sosial sampai dengan 2018 sebanyak 547.506 laporan," kata Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu.

Sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat 12 kelompok konten yang dikategorikan sebagai konten negatif.



Kategori konten negatif itu, antara lain pornografi/pornografi anak, perjudian, pemerasan, penipuan, kekerasan/kekerasan anak, dan; fitnah/pencemaran nama baik. Dilanjutkan dengan pelanggaran kekayaan intelektual, produk dengan aturan khusus; provokasi SARA, berita bohong, terorisme/radikalisme; dan informasi/dokumen elektronik melanggar undang-undang lainnya.

"Sampai akhir 2018, penanganan konten negatif total sebanyak 984.441. Angka itu termasuk yang dilaporkan dalam bentuk website," ungkap dia.

Berdasarkan kategori konten tiga terbanyak, konten yang paling banyak ditangani adalah pornografi, perjudian, dan penipuan. Konten pornografi sebanyak 898.108, sementara perjudian sebanyak 78.698 dan konten yang penipuan 5.889. ***

'Mantan Gubernur BI' Jadi Komisaris Utama Tokopedia

Jakarta - Pada awal Januari 2019, Tokopedia menunjuk Agus Martowardojo sebagai Komisaris Utama. Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) dilatarbelakangi sepak terjangnya yang dianggap inovatif.

Salah satunya, kebijakan Bank Indonesia 7-days Reverse Repo Rate yang memperkuat transmisi kebijakan moneter dan upaya pengendalian inflasi yang terpadu di seluruh daerah di Indonesia.

William Tanuwijaya, CEO sekaligus Co-Founder Tokopedia, mengatakan pengalaman dan kearifan Agus Martowardojo akan sangat berharga dalam membina para pemimpin dan institusi Tokopedia untuk menjadi perusahaan teknologi kelas dunia.

"Kehadiran Pak Agus akan memperkuat momentum kinerja perusahaan yang tengah memasuki tahun ke-10 mewujudkan misi pemerataan ekonomi secara digital," katanya.

Selain pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia, Agus Marto – sapaan akrabnya – juga memiliki pengalaman sebagai Menteri Keuangan periode 2010-2013. Agus disebut aktif memelihara stabilitas dan ketahanan perekonomian Indonesia, melalui pengelolaan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan peredaran uang rupiah yang kredibel.



Jabatan direktur utama Bank Mandiri pun pernah dirasakannya selama 5 tahun dari 2005-2010. Saat itu, dia melakukan transformasi untuk memperkuat kinerja Bank Mandiri, mengembangkan unit-unit bisnis strategis, menekan kredit bermasalah secara signifikan, dan membangun budaya kerja berbasis kinerja dan berintegritas.

Maka itu, tak heran bila Agus sempat diganjar dengan beragam penghargaan, seperti Gubernur Bank Sentral Terbaik se-Asia Pasifik dari majalah Global Markets (EuroMoney) pada tahun 2017; Finance Minister of the Year untuk Asia Pasifik dari The Banker (Financial Times) pada tahun 2012; dan Asia Best Executive dari AsiaMoney pada tahun 2006.

"Saya melihat Tokopedia sangat konsisten memberdayakan masyarakat melalui teknologi, sehingga ekonomi Indonesia dapat terus tumbuh secara kuat, seimbang dan berkesinambungan. Saya senang dapat bergabung dengan Tokopedia dan berkontribusi pengalaman saya untuk mendukung cita-cita perusahaan dalam mendorong pengembangan ekonomi yang inklusif," jelas Agus. ***



Ketua APJII Wilayah Bali
Andhy Sabli Tagjira

Pendidikan: Bell College,
University of the West of Scotland
Pengalaman:
owner PT Sano Komunikasi

“Terpenting mampu bermanfaat untuk internal APJII dan eksternal; masyarakat secara luas”

Sebagai Ketua APJII Wilayah Bali, seperti apa kondisi usaha dan iklim bisnis di Bali saat ini?

Kondisi usaha dan Iklim bisnis di Bali saat ini relatif stabil. Bali yang merupakan salah satu tujuan wisata memang selalu menjanjikan, jika bicara tentang iklim bisnis atau peluang bisnis. Pulau Bali memang relatif sangat kecil, yakni 5.632,86 km persen atau 0,29 persen dari luas kepulauan Indonesia. Namun, sebagai destinasi pariwisata dunia, Pulau Bali memiliki posisi yang penting di Indonesia. Bali sering dipilih sebagai lokasi pertemuan-pertemuan nasional maupun internasional.

Hal ini merupakan kegiatan positif yang sangat membantu mengangkat iklim bisnis di Bali. Seakan-akan Bali ini menjadi pintu gerbangnya Indonesia di mata dunia. Apa pun hal yang terjadi di Bali, gaungnya akan cepat tersebar di mancanegara. Hal ini tentu sangat menunjang bisnis rekan-rekan ISP (Internet Service Provider) yang tergabung dalam anggota APJII Bali, yang saat ini berjumlah 57 ISP.

Apa saja program kerja baru di APJII Bali yang bapak pimpin dalam tiga tahun ke depan?

Program-program kerja APJII selama 3 tahun ke depan tentunya mengadopsi program positif yang sebelumnya berjalan baik dan memberikan inovasi program. Salah satunya, keterlibatan "Miss Internet" dalam setiap program-program APJII, dalam rangka menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan instansi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Kami sudah door to door ke beberapa instansi pemerintah di Bali. Seperti Pemerintah Provinsi Bali melalui Diskominfo Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, Kota Denpasar, dan kabupaten lainnya yang masih dijadwalkan dalam agenda mendatang.

Hal ini diharapkan mampu memberikan jembatan komunikasi positif, sehingga ke depan kerja sama dapat terjalin. Selain itu, bersama "Miss Internet", kami melakukan sosialisasi ke kampus-kampus, sekolah, dan bekerja sama dengan LSM pegiat sosial untuk melakukan aksi-aksi/kampanye positif penggunaan internet yang baik.

Dengan segala program kerja yang direncanakan, apa saja target Anda?

Targetnya sederhana, yang mana program kerja yang dicanangkan tidak hanya ada di atas kertas atau di atas meja. Namun, mampu direalisasikan dengan baik. Yang terpenting, mampu bermanfaat untuk internal APJII dan eksternal, masyarakat secara luas. Selama ini, meski belum lama waktu saya memimpin, saya amat dampak positifnya sangat terasa.

Apa saja tantangan-tantangan usaha di Bali dan bagaimana pengurus mencari solusinya?

Tantangan kegiatan usaha di Bali yang nyata dirasakan saat ini, saya kira lebih terkait dengan bencana alam (forje majeure) yang belakangan sering melanda wilayah Indonesia. Bali tentu merasakan pula. Misalnya, aktivitas Gunung Agung yang masih

yang belakangan sering melanda wilayah Indonesia. Bali tentu merasakan pula. Misalnya, aktivitas Gunung Agung yang masih dalam kondisi fluktuatif dan masih berpotensi terjadi letusan, bahkan erupsi sempat beberapa kali terjadi

Selain itu, gempa bumi yang sempat dirasakan, juga membuat kondisi agak kurang kondusif. Tidak bisa dipungkiri, hal ini sangat berpengaruh dan berdampak langsung terhadap kunjungan wisatawan ke Bali yang mempengaruhi tingkat okupansi kamar hotel. Selain itu, ketergantungan listrik dan backbone internet di Pulau Bali dari Pulau Jawa, juga membuat harga internet di Bali relatif masih lebih mahal. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi usaha ISP di Bali. Dalam hal ini, kami sebagai pengurus, berusaha dan berupaya mencari segala alternatif baru lain yang dapat menjawab segala tantangan tersebut.

Apa saja peluang bisnis internet di Bali?

Peluang bisnis internet di Bali masih sangat besar. Terutama pemanfaatan teknologi informasi khususnya media sosial seperti Facebook, Youtube, dan Instagram yang juga semakin disadari pelaku usaha sebagai sarana untuk memasarkan produk dan jasa yang dirasa dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan lebih cepat. Yang paling penting, cara ini dianggap sangat murah karena hanya memerlukan koneksi internet. Tentu ini menjadi peluang besar juga untuk ISP atau penyedia jasa layanan internet di Bali. Harapannya hal ini akan meningkatkan perkembangan bisnis lainnya, seperti aplikasi atau startup ke depannya.

Dan bagaimana APJII Bali bisa berperan penting dan menjadi solusi bagi perkembangan industri internet yang sehat di Bali?

Tentu kami berkewajiban mengawal program kerja yang dicanangkan pengurus pusat APJII, dan juga kerja sama dan kolaborasi dengan instansi pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat agar keberadaan APJII tidak hanya berorientasi bisnis, tapi juga CSR yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, penguatan internal juga kami lakukan dengan dilakukan kunjungan "Miss Internet" didampingi saya atau humas APJII untuk berkunjung ke ISP-ISP di Bali yang menjadi anggota APJII sehingga harapannya mampu memberikan dampak positif dengan terjalannya komunikasi yang baik.

Kapan dan apa alasan Anda bergabung ke APJII?

Bergabung pada 2013. Alasan utamanya, karena suka berorganisasi. Selain itu, informasi mengenai penyebaran dan pengembang usaha banyak dapat dari APJII. Kemudian dengan bergabung di APJII, juga bisa melihat ketimpangan penyebaran internet, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan penyedia lainnya supaya mau ikut membantu wilayah lain yang masih kesulitan dan belum mendapat akses internet.

Saat ini beberapa wilayah di daerah masih sangat tergantung dengan BUMN untuk akses internetnya, oleh karena itu, dengan saya bergabung di APJII ini saya ingin mengajak rekan-rekan lainnya untuk turut ikut berkontribusi dan berani berinvestasi mengembangkan daerah-daerah yang masih minim jangkauan internet. ***



Ketua Bidang Keamanan Cyber APJII

Eddy Santoso Jaya
Surakarta, 8 Maret 1974

Pendidikan: Magister Manajemen Universitas Bina Nusantara
Pengalaman:
Managing Partner KLOLA PT Arka Data Primatam
Head of Research and Development APJII

“Membuat Antidosis yang Bisa Dipakai Bersama oleh ISP-ISP”

Sebagai Ketua Bidang Keamanan Cyber, seperti apa kondisi keamanan cyber di Indonesia saat ini?

Kalau dilihat dari kondisi sekarang, problem yang ada di masyarakat pada umumnya adalah kurang peduli terhadap keamanan. Terutama terhadap data personal mereka. Sebagai contoh, masih banyak masyarakat yang tidak me-lock data pribadi mereka dan selalu melakukan share data mereka yang notabene adalah berbahaya dan dapat merugikan bagi mereka. Untuk kondisi ini kita sebagai asosiasi bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi tentang keamanan baik itu personal dan perusahaan.

Apa saja program-program kerja di bidang Anda dalam tiga tahun ke depan?

Program-program utama yang kami jalankan adalah :

- Sosialisasi dan awareness, serta latihan dan seminar
- Membuat antidosis Bersama yang didukung oleh beberapa perusahaan dan bisa dipakai bersama oleh para ISP
- Pengembangan dan me-lead CA untuk di Indonesia

Dengan segala program kerja yang direncanakan, apa saja fokus dan target bidang yang Anda pimpin dalam tiga tahun mendatang?

Pengembangan CA yang menjadi fokus utama kami.

Apa saja tantangan di bidang ini, yang mungkin Anda hadapi ke depan?

Awareness masyarakat dan pemerintah, serta pengembangan teknologi di bidang security yang semakin berkembang dan selalu harus up to date.

Apa saja peluang dan tantangan bisnis internet di Indonesia dalam tiga tahun ke depan?

Peluang di bidang internet security merupakan peluang dan peluang karir bagi SDM yang akan mengembangkan.

Bagaimana APJII bisa berperan penting dan menjadi solusi bagi perkembangan industri internet yang sehat di Tanah Air?

Karena APJII mengelola sumber daya internet di Indonesia terutama IP, sehingga APJII akan menjadi barometer dan tulang punggung pengembangan internet Indonesia.

Apa latar belakang Anda bergabung sebagai pengurus APJII dan sejak kapan?

Kalau cerita latar belakang, saya seorang maniak terhadap IT yang hidupnya based on IT. Background education saya adalah computer engineering yang berhubungan dengan control dan electronic. Lalu berkembang ke arah software dan network, kemudian beralih ke manajemen. 17 tahun bergerak di education dan network solution, serta software development. ***

APJII DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TEKAN KESEPAKATAN PEMANFAATAN DATA NIK

Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jamalul Izza, mengatakan saat ini seluruh anggota APJII dapat memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan KTP elektronik untuk melakukan proses verifikasi pelanggan.

Pemanfaatan ini bisa dilakukan, setelah APJII secara resmi menyepakati kerja sama melalui penandatanganan perjanjian kerja Sama (PKS) dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Jamal, verifikasi data pelanggan melalui sistem Dukcapil, nantinya bisa dilakukan oleh perusahaan Internet Service Provider (ISP) yang melayani konsumen ritel atau perorangan. Langkah ini juga sebagai antisipasi kejahatan siber yang kini marak terjadi.

“Kalau untuk korporasi itu tidak ada masalah. Karena sudah ada NPWP dan dokumen resmi perusahaan. Sekarang ini lebih kepada pelanggan perorangan. Ini penting, karena ketika pelanggan perorangan ingin menggunakan internet broadband ke ISP, identitas yang mereka berikan adalah KTP. Sementara KTP bisa saja dipalsukan. Nah, teman-teman anggota APJII bisa lakukan verifikasi terkait keaslian identitas itu melalui sistem Dukcapil,” jelas Jamal pada medio Januari 2019.

Lebih lanjut, Jamal menjelaskan, verifikasi data ini sama halnya dengan registrasi prabayar yang dilakukan operator seluler. Tujuannya sama-sama mencegah tindak kejahatan di internet.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, kerja sama pemanfaatan data NIK, kependudukan, dan KTP elektronik merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem single identity number. Sederhananya, data kependudukan tunggal dapat digunakan untuk semua keperluan termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan begitu, masyarakat atau nasabah dapat lebih mengoptimalkan sistem administrasi perusahaan melalui ketersediaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat,” jelasnya.

Kata Zudan, sejak awal 2019, ada 14 lembaga yang melaksanakan kerja sama dengan Dukcapil. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan pentingnya verifikasi data yang harus dilakukan oleh lembaga tertentu.

Selain APJII, 11 perusahaan jasa keuangan juga sepakat melakukan kerja sama pemanfaatan data dari Dukcapil. kesebelas perusahaan

PEMROV KALBAR DAN PEMKOT SINGKAWANG DUKUNG PENERAPAN PALAPA RING BARAT



Singkawang – Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Eva Marlina, bertemu dengan pemerintah daerah Kalimantan Barat, salah satunya Singkawang, pada awal Januari 2019.

Dalam pertemuan itu, membahas mengenai penggunaan Palapa Ring Barat kerja sama APJII dan BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.

“Pertemuan dengan pemerintah daerah setempat ini sebetulnya silaturahmi dan audiensi terkait dengan penggunaan Palapa Ring Barat. Kebetulan, salah satu titik Palapa Ring Barat ada di Singkawang. Maka dari itu, kami berinisiatif bertemu dengan pemerintah daerah di sana,” jelas Eva.

Lebih lanjut dikatakan Eva, dalam kesempatan itu APJII disambut baik oleh Wakil Walikota Singkawang, Drs H Irwan MSi. Banyak hal dibicarakan APJII bersama wakil walikota. Dari pembicaraan hampir 1 jam itu, berujung pada dukungan pemerintah daerah Singkawang terkait dengan konektivitas internet melalui Palapa Ring Barat.

“Beliau sangat terbuka untuk bekerja sama dengan APJII, agar Palapa Ring Barat ini dapat meningkatkan konektivitas dan pemerataan internet di Singkawang dan sekitarnya. Sekaligus APJII juga ingin menambah satu titik IIX di Kalimantan Barat dan sekitarnya,” terang Eva.

Selain bertemu dengan wakil walikota Singkawang, perwakilan APJII juga bertemu dengan Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji SH MHum. Pertemuan dengan gubernur Kalbar itu juga membahas terkait dengan Palapa Ring Barat dan manfaat dari teknologi informasi (TI).

“Kami bertemu beliau di pendopo gubernur. Di sana, kami memperkenalkan APJII dan menginformasikan sehubungan rencana penerapan Palapa Ring Barat. Kemudian, diskusi tentang pemanfaatan TI bersama beliau,” pungkasnya. ***

APPLE TETAP RILIS PRODUK DI TAHUN 2019



Jakarta – Apple Inc berencana mengumumkan produk terbaru pada 2019. Rencana peluncuran produk anyar ini tak terpengaruh dengan saham Apple yang turun karena deretan produk iPhone yang dianggap kurang sukses di pasaran.

Hal itu dikonfirmasi langsung oleh CEO Apple, Tim Cook. Produk Apple di tahun 2019, dijamin Cook akan sangat menarik perhatian para penggunanya.

“Anda akan melihat kami mengumumkan layanan baru pada tahun ini. Akan ada lebih banyak hal menarik bakal hadir,” katanya seperti dikutip dari CNBC belum lama ini.

Dikatakannya, sejauh ini Apple melakukan pengembangan layanan baru. Terutama pada bidang layanan kesehatan. Layanan ini di masa mendatang sukses dan berkontribusi bagi manusia.

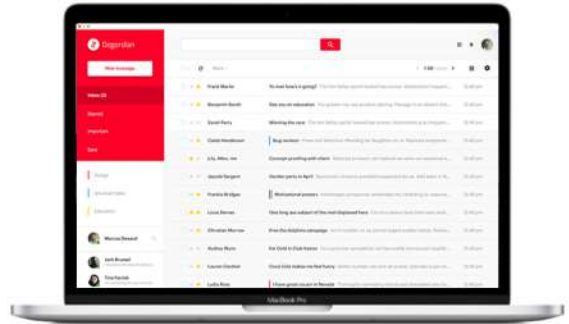
“Ini merupakan sebuah bidang yang saya percayai, di masa depan nanti dan melihat ke belakang, Anda bertanya, ‘Apa kontribusi terbesar Apple bagi umat manusia?’ Jawabnya adalah bidang kesehatan,” ucap Cook.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, kerja sama pemanfaatan data NIK, kependudukan, dan KTP elektronik merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem single identity number. Sederhananya, data kependudukan tunggal dapat digunakan untuk semua keperluan termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan begitu, masyarakat atau nasabah dapat lebih mengoptimalkan sistem administrasi perusahaan melalui ketersediaan data kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat,” jelasnya.

Sekadar informasi, Apple telah membuat gebrakan di dalam industri kesehatan dan kebugaran melalui perangkat buatannya, termasuk fitur penghitung langkah di iPhone hingga pelacak detak jantung di Apple Watch.

TIPS MENGHAPUS TUMPUKAN E-MAIL SECARA CEPAT



Jakarta – Terkadang banyaknya e-mail masuk dan menggunung, lalu kita malas untuk menghapusnya menjadi persoalan tersendiri. Jika dibiarkan, maka space yang diberikan untuk menerima e-mail baru pun terganggu.

Kali ini redaksi Buletin APJII akan memberikan sedikit informasi dan tips agar e-mail tak tiba-tiba menggunung. Berikut detailnya:

1. Perluanya e-mail Lama Dihapus

Barangkali sebagian di antara kita malas untuk menghapus satu-satu e-mail yang masuk. Tentu saja ini butuh effort besar bila dilakukannya seperti itu. Maka, sekarang Anda bisa melakukan dengan lebih mudah, dengan langkah menetik "in:inboxbefore:2015/01/01" di 'search', jika ingin menghapus pesan sebelum 1 Januari 2015.

2. Sebisa Mungkin Cek e-mail secara Rutin

Hal yang satu ini memang perlu dilakukan layaknya minum obat. Buatlah rutinitas di mana Anda harus mengecek e-mail kamu pada waktu tertentu. Buat jadwal 3 kali sehari; pagi, siang, dan malam. Di saat itu, Anda bisa memilah e-mail yang diterima sehingga tak perlu lagi menumpuk keesokan harinya.

3. Lakukan Unsubscribe!

Kebanyakan e-mail yang diterima pasti merupakan newsletter, brosur, atau katalog yang di-subscribe dari channel media lain. Jika menurut Anda, ada beberapa e-mail subscription yang tidak penting, maka unsubscribe channel media yang digunakan. Pasti setelah itu, Anda tidak akan lagi menerima e-mail subscription dari channel terkait. ***